

honnya dibagikan sebagai hadiah dalam bentuk konsesi HPH, HTI dan perkebunan untuk keluarga, teman, dan rekan kerja Soeharto, dan juga untuk para anggota kunci militer dan elit politik dalam rangka menjamin kesetiaan mereka. Maka tak pelak, pihak yang menguasai hutan memiliki kekayaan dan pengaruh yang sangat besar terhadap derap perpolitikan dan perekonomian di Indonesia. Persepsi dan pemahaman masyarakat desa terhadap perusahaan pengelola hutan tanaman industri kurang baik dan cenderung negatif, seolah-olah pemerintah pusat maupun daerah hanya mementingkan kepentingan perusahaan, sedangkan hak-hak atas pemukiman dan lahan mereka diabaikan.

Permasalahan seperti di atas itulah yang sampai sejauh ini belum ada titik temu untuk mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak, memang sudah ada beberapa upaya penyelesaian sengketa ini. Resolusi Konflik masyarakat dengan PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Kecamatan Sungai Mandau adalah: perlunya Mediasi Ulang. Mediasi sebetulnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat awam, termasuk dalam menyelesaikan konflik lahan konsesi antara masyarakat dengan PT. RAPP. Jika mediasi persamaannya adalah musyawarah, maka sudah sejak lama masyarakat menggunakannya sebagai ruang dalam penyelesaian sengketa dan konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mediasi atau musyawarah seperti kehilangan pamornya, ketika model-model penyelesaian sengketa dan konflik lebih banyak menggunakan ruang-ruang pengadilan dan ruang formal lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Awang, S.A., 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*. Yogyakarta: Debut Wahana Sinergi
- , 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Yogyakarta: Debut Wahana Sinergi
- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Bloomfield, D., Ghai, Y., dan Reilly, B. 2000. *Menganalisis Konflik yang Mengakar*. Jakarta: The British Council
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan Williams, S. 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council
- Ishak, 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku
- Mitchell, B., Setiawan, B., dan Rahmi, D.H. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Miles, H.B., dan Huberman, A.M., 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Tjetjeb Rohendi Rohidi, Penerjemah: *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Maleong, L.J., 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Rustiadi E. 2005. *Sumberdaya Bersama, Kerangka Teori Dasar: Isu dan Tantangan Masa Depan di Indonesia*. IPB Bogor.
- Saaty, T.L., 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. LPPM. Jakarta.
- Simangunsong, M, 2010. Tesis. *Kelola Konflik Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kabupaten Siak Propinsi Riau*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Usman, S. 2001. *Konflik dan Resolusi Konflik Sumberdaya Alam Perspektif Sosiologi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: UGM.
- Wardani, A. 2006. Tesis. *Konflik Sumber Daya Hutan : Studi Kasus Konflik Taman Hutan Raya Sultan Adam di Desa Mandiangin Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: UGM. Tidak Diterbitkan.

KONTRIBUSI BUMDES DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

Anwar Basri

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The Role BUMDes of the State in Economic Development the Village. Since its establishment three years ago, the vast BUMDes village has undertaken various activities aimed at developing the village economy is based on the principle of solidarity extensive. Providing capital funding for the establishment of enterprises belonging to this vast country allocation came from the village fund aims to spur a planned program of village government in encouraging the growth of productive ventures so as to sustain the growth of real income of the village. The aim of this study is the first to analyze the contribution in strengthening economic BUMDes vast village. Second, identify constraints BUMDes in Developing Economic Role in Rural vast. Third, Take Measures for Economic Development in Rural vast. While the methods used in this study is a qualitative research, in which researchers will go directly to the courts to examine the object of his study and provide direct interaction with people who aim to get in-depth information. The results of this study, it was revealed that the role of the village BUMDes vast as the economic driving quite successful, especially in the “drums” are handled BUMDes. Through these efforts, the villagers had extensive access that is easy to cross the river, so that the activities of people in the economy becomes effective. In addition, there is also a BUMDes main source for the Village des vast. While it can be said to be good, BUMDes extensive homework still has quite a bit, especially the issue of budget transparency and the interests of certain groups in the structure of the organization BUMDes.

Abstrak: Peranan BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Sejak berdiri tiga tahun yang lalu, BUMdes Desa Banglas telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun ekonomi Desa Banglas berdasarkan prinsip kebersamaan. Pemberian modal anggaran untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa Banglas ini berasal dari Alokasi Dana desa tersebut bertujuan untuk memacu program yang telah direncanakan pemerintahan desa dalam mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif sehingga dapat menopang pertumbuhan pendapatan asli desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi BUMDes dalam penguatan ekonomi, mengidentifikasi kendala BUMDes dalam peranannya membangun Ekonomi, menawarkan langkah-langkah untuk pembangunan ekonomi di Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam. Hasil penelitian ini terungkap bahwa kehadiran negara dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banglas melalui pembentukan BUMDes Banglas Bestari memiliki tiga manfaat, yakni Pehambahan PADes, Mengurangi Monopoli Usaha oleh Kelompok Tertentu, dan adanya U paya Pembangunan Desa Secara Mandiri. Dengan demikian, peran negara (pemerintah) dalam membangun ekonomi di Desa Banglas sudah dimulai dari pelaku ekonomi terkecil. Terdapat beberapa masalah peranan Negara dalam membangun ekonomi di Desa Banglas, yaitu Sejak menjadi BUMDes SHU selalu mengalami penurunan, berkurangnya alokasi SHU untuk dana sosial, berkurangnya dana alokasi SHU untuk pembangunan desa, dan adanya stagnasi jumlah tunggakan.

Kata Kunci: BUMDes, pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pemerintah desa dalam hal untuk meningkatkan pendapatan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dimungkinkan untuk mengadakan penelitian tentang Dampak Politik Ekonomi Pendirian Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa di Kabupaten

Kepulauan Meranti. Di kabupaten ini dari 96 Desa yang ada sampai dengan Tahun 2010 tidak ada Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 42 tentang Badan Usaha Milik Desa yang mengharuskan setiap desa mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Sejak

Tahun anggaran 2012 seluruh desa di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menglokasikan Dana Alokasi Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa, besar anggaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik desa tersebut sesuai dengan Hasil Musyawarah desa bersangkutan, sehingga disetiap desa terdapat perbedaan angka anggaran pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhasil mendirikan BUMDes adalah Desa Banglas. Pembentukan BUMDes mengacu pada Peraturan Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2012 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 42 Tahun 2011 di atas. Sumber modal awal BUMDes di Desa Banglas adalah sebesar Rp. 580.170.616,-. Inilah yang menjadi pijakan dan dasar operasional pengguliran dana yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi di Desa Banglas.

BUMDes di Desa Banglas mengalami peningkatan jumlah pemanfaat dari klasifikasi usaha yang ada, tahun 2012 jumlah pemanfaat sebanyak 369, kemudian tahun 2013 berjumlah 451 pemanfaat, tahun 2014 BUMDes Desa Banglas kembali mengalami peningkatan yang signifikan dengan jumlah 493. Ini menandakan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Banglas memang membantu dalam usaha warga meningkatkan produktivitasnya. Penambahan jumlah pemanfaat seperti yang dijabarkan di atas, ternyata tidak disertai dengan peningkatan jumlah pengguliran dana, ini dibuktikan dengan turunnya jumlah dana yang digulirkan sejak tahun 2012, sehingga berdampak pada berkurangnya jumlah SHU (laba) dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Terjadi ketidakstabilan dalam pengguliran dana yang berdampak pada ketidakstabilan pendapatan BUMDes. Kondisi ini semakin dipersulit dengan adanya beberapa pemanfaat yang pola pembayarannya bermasalah sehingga mengganggu laporan keuangan saat tutup buku.

Sejak berdiri tiga tahun yang lalu, BUMDes Desa Banglas telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun ekonomi Desa Banglas berdasarkan prinsip kebersamaan. Pemberian modal anggaran untuk pendirian BUM-

Des ini berasal dari Alokasi Dana Desa tersebut bertujuan untuk memacu program yang telah direncanakan pemerintahan desa dalam mendorong tumbuhnya usaha-usaha produktif sehingga dapat menopang pertumbuhan pendapatan asli desa. Dari konteks tersebut, ternyata upaya untuk meningkatkan PADes tersebut banyak menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat.

Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa selama ini juga dinilai tidak memperhatikan kondisi faktual infrastruktur yang ada di desa, ketersediaan prasarana ekonomi dan aktivitas ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja sehingga diversifikasi usaha di desa sangat terbatas. Lebih lanjut, desa menjadi tidak mandiri dan hanya menggantungkan usaha atau pencaharian nafkah kepada sektor pertanian semata. Akibat program pemerintah yang tidak berdasarkan pada potensi dan kekhasan daerah tersebut telah menyebabkan banyak potensi yang berada di desa menjadi tidak berkembang (Robinson, 2005).

Secara umum kondisi tersebut dapat dikatakan telah mencapai tahap kejenuhan. Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, upaya yang perlu dilakukan tidak lagi semata-mata mengandalkan pada kebijakan ekonomi makro, tetapi juga diimbangi dengan kebijakan mikro berupa terobosan yang secara langsung memberikan pengaruh pada peningkatan produktivitas golongan miskin tersebut, utamanya dengan peningkatan pembangunan desa yang terintegrasi (Ismawan, 2002).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi BUMDes dalam penguatan ekonomi, mengidentifikasi kendala BUMDes dalam peranannya membangun Ekonomi, menawarkan langkah-langkah untuk pembangunan ekonomi di Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Fokus penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peranan Negara dalam hal ini pembentukan BUMDes di Desa Banglas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2012-2014. Pembentukan BUMDes pada tahun 2012 lalu dinilai bertujuan untuk

melakukan pembangunan ekonomi masyarakat Desa Banglas, dan untuk melihat capaian dan faktor-faktor dalam pelaksanaan BUMDes ini perlu dilakukan kajian mendalam. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknis analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi BUMDes dalam Pembangunan Ekonomi

Adapun Kontribusi BUMDes Banglas Bestari terhadap Perekonomian Desa Banglas dapat dijabarkan berikut ini:

Adanya Penambahan PADes

Tujuan didirikannya BUMDes adalah dalam rangka memperkuat perekonomian desa yang dalam arti detil adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat desa tersebut, yang ditinjau dari segi ekonomi desa. Itulah mengapa dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDes harus berorientasi pada kebutuhan dan potensi desa. Artinya BUMDes harus memprioritaskan pada usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang sembako, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas agar masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa.

Tujuan lain pembentukan BUMDes yaitu peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika PADes bisa ditingkat maka secara makro ekonomi desa, akan didapat dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut. Sehingga apabila pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik, diharapkan akan berimbas pada naiknya kualitas hidup masyarakat. Karena salah satu tetapnya miskin desa yang tergolong miskin karena secara relatif tidak memiliki infrastruktur fasilitas-fasilitas penting

yang hanya menunggu pembangunan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

Di Desa Banglas sendiri, usaha BUMDes yang merupakan potensi di desa Banglas adalah sarana penyeberangan yang disebut masyarakat setempat sebagai "*kempang*". Kempang ini sangat vital bagi warga desa Banglas ketika ingin melintasi sungai yang ada di Desa Banglas. Setiap satu kali menyeberang akan dikenakan biaya Rp.10.000. Biaya penyeberangan itulah yang nantinya akan menjadi PADes Desa Banglas disamping usaha-usaha lainnya yang dikelola BUMDes.

Terdapat tiga kategori yang secara rutin memnfaatkan kempang di Desa Banglas sebagai media transportasi, yakni Sepeda Motor, Sepeda Motor dengan Keranjang dan orang. Adapun pendapatan total per hari sebesar Rp.525.000, per bulan Rp.15.750.000 dan per tahun Rp.189.000.000. ini adalah rincian pendapat kotor sebelum dikurangi biaya-biaya dalam operasional kempang tersebut.

Seluruh pengeluaran per tahun dalam operasional kempang adalah sebesar Rp.133.200.000 dengan rincian pengeluaran untuk upah tekong, sewa kempang dan minyak solar. ini belum biaya tidak terduga 5 % dari pendapatan per hari. Penghasilan bersih berdasarkan penghitungan dan rincian yang penulis rumuskan di atas dari usaha kempang yang dikelola oleh BUMDes bestari Desa Banglas adalah sebesar Rp.46.350.000. penghasilan ini nantinya juga akan disetorkan ke Kas Bumdes untuk dikelola dan dikalkulasikan dengan usaha lain dari BUMDes Banglas Bestari.

Hal yang lain posisi BUMDes sebagai penyumbang PADes di Desa Banglas juga dapat dilihat dari keberadaan BUMDes ini ketika mendapat pendampingan. Sewaktu UED-SP di Desa Banglas yang kemudian dilakukan pendampingan, modal BUMDes ini telah mendapat tambahan RP.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Ini tentu saja juga menambah PADes Desa Banglas.

Terdapat dua hal yang menjadi keuntungan utama keberadaan BUMDes di Desa Banglas sejauh ini, yakni adanya penambahan PADes pasca pendampingan dan transportasi lebih

murah dengan adanya *kempang*. Persoalan yang terjadi pada desa umumnya di Indonesia adalah minimnya PADes dan sulitnya akses ke luar.

Mengurangi Monopoli Usaha

Keberadaan BUMDes Banglas Bestari juga bermaksud untuk mengurangi kegiatan monopoli yang dipraktikkan oleh oknum yang memiliki modal. Misalnya dalam menetapkan harga transportasi *kempang* seperti yang disinggung sebelumnya. *Kempang* sebagai alat transportasi inti dan sangat vital untuk akses warga dulunya dikuasai oleh pemilik *kempang* dengan harga yang cukup tinggi, yakni Rp. 15.000 untuk satu kali jalan. Meskipun masyarakat keberatan dengan harga tersebut, namun karena hanya *kempang* satu-satunya alat transportasi mau tidak mau masyarakat menerimanya. Saat ini, setelah BUMDes memiliki *kempang* sendiri dengan tarif yang lebih murah, yakni hanya Rp. 10.000 untuk satu kali jalan, masyarakat merasa sangat terbantu.

Diharapkan pembentukan BUMDes berangkat dari partisipatif dan inisiatif masyarakat desa, karena yang mengetahui secara pasti dan detil tentang semua potensi desa dan sumber daya desa adalah masyarakat itu sendiri. Prinsip emansipatif perlu dikedepankan karena dalam hal ini perbedaan gender tidak boleh menjadi penghalang kemajuan desa. Bahkan potensi atau sumber daya yang dapat dikembangkan bisa berasal dari pihak wanita. Misalnya industri rumah tangga yang berbasis pada pembuatan makanan, alat rumah tangga ataupun kerajinan tangan yang memiliki nilai jual.

Selain itu prinsip kebersamaan (*member base*) menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun sistem kerekatan antar anggota masyarakat, terutama dalam menjalankan usaha bersama. Dengan berusaha secara bersama-sama diharapkan akan membangkitkan kemandirian dalam diri masyarakat, sehingga tidak mengharap lagi jenis-jenis bantuan dari pemerintah baik yang bersifat hibah ataupun pinjaman.

Adanya Pembangunan Desa Secara Mandiri

Kontribusi Bumdes ini ialah sebagai salah satu pembangunan desa mandiri yang dapat berjalan dengan percaya diri bahwa desa memang

sudah berhasil mengatur rumah tangganya sendiri dan menciptakan desa yang mandiri yang tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang ada.

Desa mandiri berpeluang dibangun dan dikembangkan melalui UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Pasal 87 UU Desa dan pasal 132 PP 43 sama-sama memakai frasa “desa dapat” mendirikan BUMDes. Artinya, setiap desa diberi peluang yang sama untuk mendirikan BUMDes, meski bukanlah sesuatu yang bersifat kewajiban yang memaksa. Dengan demikian BUMDes merupakan kelembagaan desa berbasis kebutuhan desa, bukan bentukan dari atas yang *targeted*.

Pendirian BUMDes harus diletakkan sebagai strategi jitu dalam mengelola asset desa. Gagasan pendiriannya harus diorganisir melalui mekanisme musyawarah desa, yakni sebuah forum demokratis yang mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan Kelompok warga. Musyawarah desa ini sendiri merupakan *mandatory* UU Desa yang hendak melembagakan demokrasi lokal melalui perbincangan isu-isu strategis, salah satunya soal pendirian BUMDes. Disamping mekanisme musyawarah desa, dalam mendirikan BUMDes ini seharusnya desa telah memiliki daftar inventarisasi asset.

Mendirikan BUMDes pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa untuk mencapai derajat ekonomi masyarakat desa yang lebih tinggi. Dengan berbekal daftar inventarisasi dan peta asset desa, forum musyawarah desa melakukan praktik *deliberative democracy* untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes.

Masalah BUMDes Membangun Ekonomi

Pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Banglas melalui pembentukan BUMDes disertai dengan berbagai hambatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun telaahan mengenai program pemberdayaan banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program dan ketidakberhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan, namun harus diakui bahwa ada banyak program pemberdayaan ya-

ng berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BUMDes ini dapat berasal dari kepribadian individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Kendala-kendala tersebut adalah:

Berkurangnya SHU dan Dana Sosial

Berdasarkan laporan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) dari Tahun Anggaran 2012 sampai Tahun Anggaran 2014, BUMDes Banglas Bestari dari segi laba selalu mengalami penurunan, dan penurunan itu juga disertai dengan turunnya Dana Sosial. Berkurangnya Dana Sosial tersebut disebabkan oleh berkurangnya Sisa Hasil Usaha (SHU), yang mana 15% dari SHU adalah diperuntukkan untuk Dana Sosial. Logikanya jika SHU berkurang, maka jumlah Dana Sosial juga otomatis berkurang.

Terjadinya penurunan adalah adanya beberapa kendala dalam pola penagihan atas pinjaman warga. Terdapat kekeliruan dalam tata cara peminjaman dan penagihan pinjaman tersebut. Dari data laporan MDPT dapat disimpulkan bahwa berkurangnya laba dan dana sosial BUMDes Banglas Bestari disebabkan oleh dua hal, yakni tidak tercapainya target pengembalian pinjaman oleh pemanfaat; kurangnya inisiatif petugas dalam penagihan. Peran pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan petugas soal dana bergulir seharusnya lebih ditingkatkan mengingat minimnya pendidikan dan pelatihan yang ada selama ini

Berkurangnya Pembagian SHU

Berdasarkan Anggaran Dasar BUMDes Banglas Bestari Desa Banglas BAB IV Pasal 1 s/d 4 tentang pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), alokasi SHU yang diperuntukkan membangun desa adalah 10% dari SHU. Dengan berkurangnya SHU sejak tahun 2012, dana sumbangan untuk pembangunan desa juga berkurang. Sumbangan SHU BUMDes untuk pembangunan Desa Banglas selalu mengalami penurunan sejak tahun 2012. Ini tentu saja merupakan hasil yang cukup mengecewakan mengingat banyak perputaraan dana yang digulirkan oleh BUMDes Banglas Bestari.

Penyebab berkurangnya SHU tersebut

yang kemudian berimbas pada berkurang alokasi dana yang diperuntukkan untuk pembangunan desa ini sama dengan yang telah dibahas tadi, yakni lemahnya pengawasan dan pola penagihan yang belum konsisten. Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan akan terjadi kemerosotan hasil usaha BUMDes, dan pada akhirnya mengalami kebangkrutan.

Stagnasi Jumlah Tunggakan

Berdasarkan data statistik yang penulis dapat dari MDPT BUMDes Banglas Bestari dari tahun 2012 sampai tahun 2014, telah terjadi peninggakan jumlah uang yang tertunggak oleh pemanfaat. Inilah salah satu penyebab terjadinya penurunan laba sejak tahun 2012. Telah terkadi tunggakan yang cukup banyak oleh pemanfaat, baik yang meminjam dalam bentuk UED maupun SP. Namun yang patut mendapat sorotan adalah adanya stagnasi tunggakan antara taun 2013 dan tahun 2014. Tahun 2013 total tunggakan sebesar Rp.22.571.444,-, tahun 2014 juga sama jumlahnya, artinya dalam waktu satu tahun tidak ada pembayaran dari yang tertunggak tahun 2014, disinilah letak persoalan dan sekaligus penyebab turunnya laba (SHU) tahun 2013 dan tahun 2014.

Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan. Jika suatu masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat.

Kondisi masyarakat di Desa Banglas yang kurang adanya akses dengan masyarakat luar mengakibatkan masyarakat sulit untuk menerima suatu perubahan dan perkembangan. Ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan

BUMDes yang selama 3 tahun ini berdiri belum mampu menampung ide-ide dari luar sehingga perkembangannya terkendala. Masyarakat juga berpikiran demikian, banyak peluang untuk mengembangkan potensi Desa Banglas dengan keberadaan BUMDes ini, namun kurangnya komunikasi dengan masyarakat luar mengakibatkan Desa Banglas belum begitu merasakan manfaat adanya BUMDes ini.

Selain itu, adarasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya, semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima.

Adanya Kelompok kepentingan

Beberapa kegiatan tertentu lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan lain, terutama bila kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh komunitas. Sebagai contoh di banyak wilayah, dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dirasakan masih sangat kurang karena masyarakat umumnya masih menganggap bahwa pemimpin adalah laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau sesuai dengan sistem patriaki.

Modal fisik terdiri dari dua kelompok, yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia. Modal fisik tidak dapat digunakan apabila tidak ada modal manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan di dalamnya. Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk (*entry point*) untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Kehadiran negara dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Banglas melalui pemben-

tukan BUMDes Banglas Bestari memiliki tiga manfaat, yakni Penambahan PADes, Mengurangi Monopoli Usaha oleh Kelompok Tertentu, dan adanya Upaya Pembangunan Desa Secara Mandiri. Dengan demikian, peran negara (pemerintah) dalam membangun ekonomi di Desa Banglas sudah dimulai dari pelaku ekonomi terkecil. Terdapat beberapa masalah peranan negara dalam membangun ekonomi di Desa Banglas, yaitu Sejak menjadi BUMDes SHU selalu mengalami penurunan, berkurangnya alokasi SHU untuk dana sosial, berkurangnya dana alokasi SHU untuk pembangunan desa, dan adanya stagnasi jumlah tunggakan antara tahun 2013 dan tahun 2014. Dengan demikian, BUMDes Banglas Bestari disimpulkan mengalami masalah yang cukup serius, terutama soal tunggakan dan manajemen. Meskipun demikian, usaha BUMDes terutama di bidang transportasi patut diapresiasi. Adanya sarana penyeberangan yang disebut masyarakat setempat sebagai “*kempang*”. Kempangini sangat vital bagi warga desa Banglas ketika ingin melintasi sungai yang ada di Desa Banglas. Biaya penyeberangan itulah yang nantinya akan menjadi PADes Desa Banglas disamping usaha-usaha lainnya yang dikelola BUMdes.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufiz, 1995. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Andy Sutardy, Engkoem Damini, 1973. *Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ikhtiar Baru
- Handyaningrat, Soewarno, 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Ibnu Syamsi, 1983. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aklsara
- Koentjaraningrat, 1990. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Soetjitro, 1988. *Pembinaan Ketahanan Masyarakat Desa*. Jakarta: Gramedia
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.